

LAPORAN PENELITIAN HIBAH BERSAING



PENINGKATAN DAYA SAING EKONOMI JAWA TENGAH MENGHADAPI ERA OTONOMI DAERAH

Pengusul:

MUHAMMAD KHOLIS

NIDN : 0015056020

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TERBUKA
2013**

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI**

Judul Penelitian : **PENINGKATAN DAYA SAING EKONOMI JAWA
TENGAH MENGHADAPI ERA OTONOMI
DAERAH**

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 550/561 / Ekonomi Pembangunan

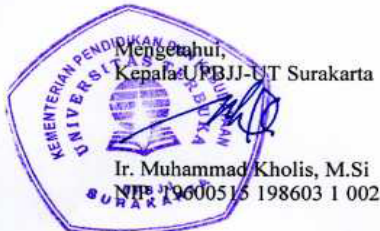
Ketua Peneliti:

- a. Nama Lengkap : Ir. Muhammad Kholis, M.Si
- b. NIDN : 0015056020
- c. Jabatan Fungsional : Lektor
- d. Program Studi : Ekonomi Pembangunan
- e. Nomor HP : 081229862727
- f. Alamat surel (e-mail) : mkholis@ut.ac.id

Anggota Peneliti (1)


- a. Nama Lengkap : Ratih Paramitasari, SE., M.Si
- b. NIDN : 0023128402
- c. Perguruan Tinggi : Universitas Terbuka

Biaya Penelitian : Rp. 75.000.000,00



Tangerang Selatan, 28 Desember 2013

Ketua Peneliti,


Ir. Muhammad Kholis, M.Si
NIP. 19600515 198603 1 002



RINGKASAN

Diberlakukannya otonomi daerah merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah untuk lebih mandiri, terutama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan daerah dalam pengelolaan potensi sumber daya alam dan pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan ini diperlukan untuk memantapkan struktur perekonomian daerah dan peningkatan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan ekonominya. Agar pembangunan daerah tersebut bisa tercapai secara optimal, maka dipandang perlu untuk membuat perencanaan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi sektor-sektor, menentukan daya saing komoditas unggulan dan memetakan peluang dan kekuatan Propinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan daya saing ekonominya.

Metode yang digunakan untuk melihat struktur perekonomian Propinsi Jawa Tengah ada 2 (dua) metode. Metode *pertama* adalah metode *Location Quotient* (LQ) yang digunakan untuk mengetahui potensi sektor, sub sektor dan produk yang terdapat di Propinsi Jawa Tengah. Metode *kedua* adalah analisis SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats*) yang digunakan untuk mengevaluasi kesempatan dan tantangan di lingkungan bisnis atau lingkungan internal pemerintah daerah.

Hasil kajian menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah yang memiliki nilai $LQ > 1$ antara lain sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor listrik

dan air bersih dan sektor perdagangan, hotel serta restoran. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hampir separuh sektor di Provinsi Jawa Tengah dapat menjadi sektor basis bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Kata Kunci : daya saing, Jawa Tengah, Location Quotient, SWOT Analysis

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji serta syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas segala berkat dan limpahan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini merupakan salah satu sumbangsih yang dapat penulis berikan untuk memperkaya wacana bidang ekonomi.

Disadari sepenuhnya bahwa tanpa perkenan dan ridlo-Nya, kesungguhan, ketekunan, kerja keras serta bantuan dan dukungan dari berbagai pihak maka penelitian ini tidak dapat diselesaikan. Untuk itu penulis haturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

- 1) Direktorat Perguruan tinggi yang memberikan dananya melalui skema hibah desentralisasi untuk penelitian hibah bersaing
- 2) Rektor Universitas Terbuka Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed, PhD.
- 3) Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka
- 4) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah membantu administrasi
- 5) Para *reviewer* yang sudah meloloskan penelitian ini
- 6) Seluruh pihak yang terkait dalam pengumpulan data semua pihak yang ikut andil membantu selesainya penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, namun setidaknya penulis berbangga hati dapat menyumbangkan sebagian pemikiran dalam ilmu ekonomi. Semoga penelitian ini memberikan

manfaat dan menambah khasanah bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi. Amien.

Tangerang Selatan, 28 Desember 2014

Peneliti,

M. Kholis

DAFTAR ISI

	Halaman
Cover.....	1
Halaman Pengesahan.....	2
Ringkasan.....	3
Kata Pengantar.....	5
Daftar isi.....	7
Daftar Gambar.....	8
Daftar Tabel.....	9
Bab 1 Pendahuluan.....	10
Bab II Tinjauan Pustaka.....	16
Bab III Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	22
Bab IV Metode Penelitian.....	23
Bab V Hasil dan Pembahasan	46
Bab VI Kesimpulan dan Saran.....	47
Daftar Pustaka.....	49
Lampiran-lampiran	
1. Lampiran Publikasi	51
2. Lampiran Biodata Peneliti	52

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Laju Pertumbuhan PDRB Atas dasar Harga Konstan 2000 Propinsi Jawa Tengah 2004-20012.....	8
Gambar 5.1. Peta Wilayah Jawa Tengah.....	29

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1. Matriks Analisis SWOT.....	28
Tabel 5.1. Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.....	30
Tabel 5.2. Hasil Perhitungan LQ.....	39
Tabel 5.3. Jumlah Wisatawan ke Obyek Wisata di Provinsi Jawa Tengah.....	42
Tabel 5.4. Penerapan Analisis SWOT untuk Propinsi Jawa Tengah..	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemecahan masalah kemiskinan, pengangguran, ketahanan pangan, kerusakan infrastruktur dan degradasi lingkungan di daerah, serta percepatan pertumbuhan ekonomi memerlukan suatu manajemen pembangunan yang mengatur koordinasi dan kerjasama yang solid antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hambatan yang sering muncul dalam penataan manajemen pembangunan menyangkut inkonsistensi kebijakan pusat dan daerah, ketidakselarasan antara perencanaan dan penganggaran, rendahnya transparansi dalam sumber perumusan kebijakan dan program, rendahnya akuntabilitas pemanfaatan daya keuangan publik, dan belum optimalnya penilaian kinerja.

Perumusan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di tingkat pusat perlu mempertimbangkan keragaman kondisi dan dinamika kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik daerah. Perumusan kebijakan perlu didasarkan pada pemahaman yang akurat, utuh, lengkap, dan komprehensif tentang wilayah, serta komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara terus menerus dengan para pengambil keputusan dan pelaksana kebijakan di setiap daerah. Hal ini berarti bahwa setiap kementerian/lembaga perlu memperhatikan karakteristik

dan permasalahan yang dihadapi oleh rakyat di daerah, mempercepat pembangunan ekonomi daerah secara efektif dan berkelanjutan, memberdayakan pelaku dan potensi daerah, serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi antar daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk merumuskan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan permasalahan yang terjadi di daerah. Di sisi lain, perumusan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah perlu mempertimbangkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Dengan kata lain, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu mempertimbangkan berbagai prioritas program dan kegiatan kementerian/lembaga dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Secara internal, besarnya pasar domestik dan keragaman potensi antar wilayah merupakan potensi yang besar untuk membangun perekonomian yang tangguh. Mengingat keterbatasan sumberdaya nasional, maka harus diperkuat hubungan antara pusat dan daerah melalui sinergi antara pusat-daerah sebagai bagian dari strategi dan kebijakan nasional yang komprehensif.

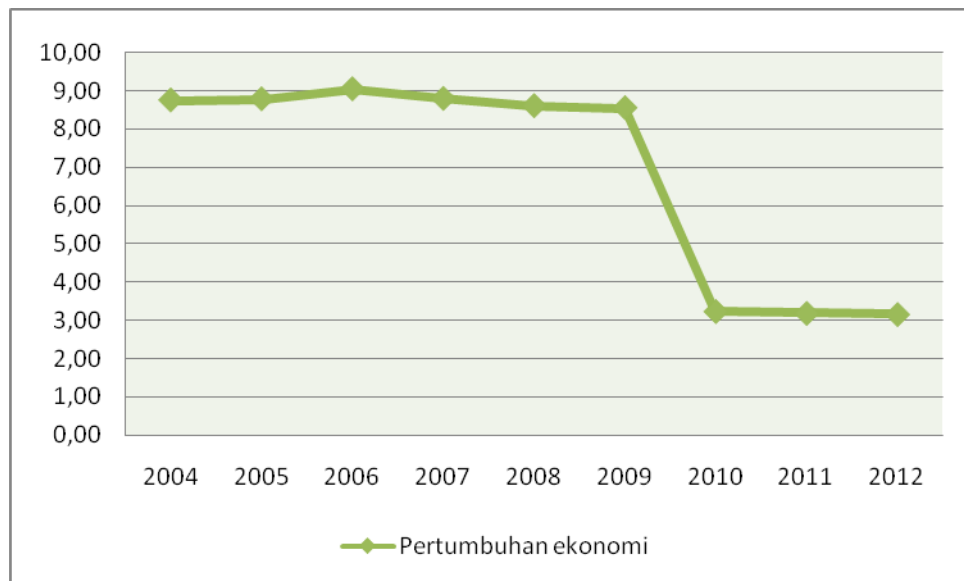
Pembangunan dalam perspektif yang luas merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap masyarakat dan institusi nasional, selain tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, pemecahan masalah ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan (Todaro, 2002). Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola

sumberdaya-sumberdaya yang ada, dengan menjalin pola-pola kemitraan antara pemerintah daerah dan pihak swasta guna penciptaan lapangan kerja, serta dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah bersangkutan.

Diberlakukannya otonomi daerah merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah untuk lebih mandiri, terutama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan daerah dalam pengelolaan potensi sumber daya alam dan pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan ini diperlukan untuk memantapkan struktur perekonomian daerah dan peningkatan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan ekonominya. Perumusan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah juga perlu mempertimbangkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Sampai saat ini pembangunan ekonomi di Propinsi Jawa Tengah menunjukkan kinerja yang semakin menggembirakan yang ditandai oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi 5,13 persen pada tahun 2004 menjadi 5,46 persen pada tahun 2008 (lihat Gambar 1.1). Kondisi ini tidak terlepas dari kemampuan pemerintah daerah dalam menggiatkan pembangunan serta dukungan potensi sumber daya alam dan manusia yang dimiliki. Dukungan tersebut cukup potensial dikembangkan guna mempercepat pembangunan di daerah ini sekaligus memantapkan struktur perekonomian daerah.

Pada tahun 2009 pertumbuhan ini mengalami penurunan signifikan hingga mencapai 3,24 persen dan akhirnya menjadi 3,16 persen pada tahun 2012. Menurunnya pertumbuhan ini tidak terlepas dari adanya shock perekonomian yang melanda dunia pada tahun 2008 hingga saat ini.



Sumber : BPS, 2013

Gambar 1.1. Laju Pertumbuhan PDRB Atas dasar Harga Berlaku Propinsi Jawa Tengah 2004-2012

Potensi yang dimiliki Propinsi Jawa Tengah menjadi daya tarik sekaligus mendorong minat investor untuk menanamkan modalnya. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu menyiapkan infrastruktur-infrastruktur pendukungnya. Mengingat banyaknya kebutuhan dan keterbatasan dana yang dimiliki Pemerintahan Daerah maka pengalokasian dana pembangunan perlu dilakukan secara efektif dan efisien serta berdayaguna.

Propinsi Jawa Tengah juga memiliki beberapa masalah dalam proses membangun perekonomiannya. Salah satunya adalah masalah kesenjangan yang terjadi dalam pengelolaan sektoral. Perekonomian di Propinsi Jawa Tengah terutama disumbang oleh sektor industri pengolahan; sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor pertanian. Sementara itu kontribusi sektor lain seperti sektor jasa dan keuangan masih relatif kecil. Padahal kedua sektor tersebut

potensial untuk dikembangkan. Kondisi ini mencerminkan belum maksimalnya pemberdayaan sektor yang berbasis pada ketrampilan dan keahlian yang sebenarnya memiliki andil besar untuk meningkatkan perekonomian.

Beberapa masalah tersebut selayaknya mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Oleh karena itu berbagai strategi dan kebijakan perlu dirumuskan untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Keberhasilan dalam memecahkan berbagai masalah yang terjadi dalam proses pembangunan akan meningkatkan kinerja dan kemandirian pemerintah daerah. Peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemandirian daerah dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan untuk mewujudkan otonomi daerah. Pemanfaatan sumber daya alam perlu dilakukan secara optimal dan bijaksana sehingga memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.

1.2. Perumusan Masalah

Era otonomi daerah yang dimulai pada tahun 1999 menuntut pemerintah daerah untuk aktif dan kreatif dalam membangun daerahnya masing-masing. Semangat otonomi daerah itu sendiri membuat Propinsi Jawa Tengah berusaha meningkatkan pembangunan sektoral dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar pembangunan daerah tersebut bisa tercapai secara optimal, maka dipandang perlu untuk membuat perencanaan pembangunan daerah.

Pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang berbasis kepada peningkatan peran serta masyarakat secara luas. Selain itu pengembangan kawasan-kawasan andalan yang didukung oleh

pengembangan sektor-sektor dan potensi komoditas unggulan diperlukan untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam mempercepat pembangunan daerah Propinsi Jawa Tengah di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/propinsi dalam suatu periode tertentu adalah melihat data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga yang berlaku atau atas dasar harga konstan. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (Arsyad, 1999).

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahunnya, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomis, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertambahan ekonomi dari tahun ke tahun.

Ada tiga pendekatan yang digunakan dalam menghitung PDRB (BPS Jawa Tengah, 2008) yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran.

a. Pendekatan produksi

Menurut pendekatan ini, PDRB dihitung melalui akumulasi nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang berada di suatu wilayah/propinsi dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit produksi tersebut dikelompokkan kedalam 9 lapangan usaha: pertanian, pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, angkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan jasa-jasa.

b. Pendekatan pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam waktu tertentu.

c. Pendekatan pengeluaran

PDRB adalah semua komponen pengeluaran aktif seperti pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok, dan ekspor *neto* dalam jangka waktu tertentu. Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian regional setiap tahun.

2.2. Teori Basis Ekonomi

Konsep dasar teori basis ekonomi (*economic base*) digunakan untuk memprediksi dampak aktivitas ekonomi pada kota atau wilayah (Waschaffer, 2010). Teori basis ekonomi mengemukakan bahwa sebuah wilayah merupakan

sebuah sistem sosio-ekonomi yang terpadu. Teori inilah yang mendasari pemikiran teknik *location quotient*, yaitu teknik yang membantu dalam menentukan kapasitas ekspor perekonomian daerah dan derajat keswasembadaan (*self-sufficiency*) suatu sektor.

Ada dua kerangka konseptual pembangunan daerah yang dipergunakan secara luas : (Azis,1994)

1. teori basis ekonomi beranggapan bahwa permintaan terhadap input hanya akan meningkat melalui perluasan permintaan terhadap output yang diproduksi oleh sektor basis (ekspor) dan sektor non basis (lokal).
2. perbedaan tingkat imbalan (*rate of return*) diakibatkan oleh perbedaan dalam lingkungan atau prasarana dibandingkan akibat ketidakseimbangan rasio modal-tenaga. Dalam konsep ini, daerah terbelakang bukan karena tidak beruntung atau kegagalan pasar, tetapi karena produktivitasnya rendah. Namun tak banyak studi empirik yang mempergunakan konsep kedua ini, disebabkan kelangkaan data. Data yang lazim dipergunakan dalam studi empirik adalah metode *location quotient*.

Dalam hubungan ini kegiatan ekonomi suatu daerah dibagi dalam dua golongan, yaitu : (Kadariah, 1985 :70). 1. Kegiatan ekonomi (industri) yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun pasar di luar daerah itu, industri ini disebut industri *basic* dan 2. Industri-industri (kegiatan ekonomi) yang hanya melayani pasar di daerah itu sendiri, dan disebut industri *non basic* atau industri lokal.

Teori basis ekonomi digunakan sebagai dasar pemikiran teknik *location quotient* pada intinya adalah industri basis menghasilkan barang dan jasa baik untuk pasar di daerah maupun untuk pasar di luar daerah yang bersangkutan, maka penjualan hasil ke luar daerah itu mendatangkan arus pendapatan ke dalam daerah tersebut. Arus pendapatan menyebabkan baik kenaikan konsumsi maupun kenaikan investasi, dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja. Kenaikan pendapatan di daerah tidak hanya menaikkan permintaan terhadap hasil industri basis melainkan juga akan meningkatkan permintaan terhadap hasil industri lokal *non basic*, sehingga pada akhirnya akan menaikkan investasi di daerah tersebut. Oleh karena itu menurut teori basis ekonomi, ekspor daerah merupakan faktor penting dalam pembangunan daerah. (Azis, 1994). Berdasarkan gagasan ini maka orang berpendapat bahwa industri-industri basislah yang patut dikembangkan di daerah.

Ada beberapa metode yang dipergunakan untuk membagi daerah ke dalam kegiatan basis dan bukan basis: Pertama, metode langsung yaitu mengukur basis dengan menggunakan survei standar dan kuesioner. Cara ini dapat menghindarkan digunakannya kesempatan kerja sebagai indikator. Tetapi metode ini memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar. Kedua, metode tidak langsung yang menggunakan pendekatan asumsi *adhoc*.

2.3. Penelitian Terdahulu

Kajian yang dilakukan oleh Sutikno dan Maryunami (2007) tentang daya saing kecamatan sebagai pusat pertumbuhan di Kabupaten Malang menggunakan

analisis Location Quotient (LQ) dan Shift-Share (SS) diperoleh gambaran sektor unggulan di masing-masing Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) sebagai berikut: SWP I mempunyai sub sektor unggulan: 1) Tanaman perkebunan, 2) Peternakan, 3) Kehutanan, 4) Perikanan, 5) Listrik, 6) Air Bersih, 7) Jasa Penunjang komunikasi. SWP II mempunyai sub sektor unggulan: 1) Tanaman bahan makanan, 2) Makanan, minuman, dan tembakau, 3) Tekstil, kulit, & alas kaki, 4) Barang dari kayu dan hasil hutan lain, 5) Pupuk kimia dan barang dari karet, 6) Alat angkutan, mesin dan peralatan, 7) Barang-barang lain, 8) Pos dan telekomunikasi, 9) Lembaga keuangan bukan bank, 10) Hiburan dan kebudayaan; SWP III mempunyai sub sektor unggulan: 1) Makanan, minuman, dan tembakau, 2) Tekstil, kulit, dan alas kaki, 3) Barang dari kayu dan hasil hutan lain, 4) Kertas dan barang cetakan, 5) Pupuk kimia dan barang dari karet, 6) Semen dan barang galian non logam, 7) Alat angkutan, mesin, dan peralatan, 8) Barang-barang lain, 9) Hotel; SWP IV mempunyai sub sektor unggulan: 1) Peternakan, 2) Kehutanan, 3) Penggalian, 4) Listrik, 5) Air bersih, 6) Sewa bangunan, 7) Hiburan dan kebudayaan.

Sementara itu SWP V mempunyai sub sektor unggulan: 1) Perdagangan, 2) Hotel, 3) Angkutan jalan raya, 4) Jasa penunjang angkutan, 5) Pos dan telekomunikasi, 6) Bank, 7) Lembaga keuangan bukan bank, 8) Perorangan dan rumah tangga; SWP VI mempunyai sub sektor unggulan 1) Peternakan, 2) Penggalian, 3) Jasa Perusahaan, 4) Pemerintahan umum, 5) Sosial kemasyarakatan, 6) Perorangan dan rumah tangga; SWP VII mempunyai sub sektor unggulan: 1) Peternakan, 2) Kehutanan, 3) Perikanan, 4) Penggalian, 5)

Listrik; SWP VIII mempunyai sub sektor unggulan: 1) Tanaman perkebunan, 2) Perikanan, 3) Perdagangan, 4) Jasa penunjang komunikasi, 5) Bank, 6) Sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan analisis kontribusi kelompok sektor ekonomi di masing-masing SPW, menunjukkan bahwa struktur ekonomi di semua SWP di dominasi oleh sektor tersier kemudian diikuti oleh sektor primer dan sekunder (Tertier, Primer, dan Sekunder). Kecuali untuk SWP II dan SWP III, kedua SWP ini mempunyai struktur dimana sektor sekunder menempati posisi kedua (Tertier, Sekunder, dan Tertier). Atau kontribusi sektor sekunder lebih besar dibanding sektor primer untuk kedua SWP tersebut. Sedangkan berdasarkan kontribusi masing-masing sektor menunjukkan bahwa sektor pertanian, industri pengolahan, serta perdangan, hotel dan restoran merupakan sektor yang dominan kontribusinya terhadap PDRB di setiap SWP.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kalensang, *et al* (2011) menunjukkan bahwa keunggulan komparatif potensi sumber daya Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terletak pada tiga sektor yaitu sektor pertanian, sektor pengangkutan & komunikasi dan sektor jasa dimana ketiga sektor tersebut juga merupakan sektor basis pada perekonomian Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Daya saing sektoral perekonomian Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro mengalami perkembangan namun secara agregat masih lemah sebagaimana ditunjukkan oleh nilai differential shift aggerat masih negatif dan perekonomian Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terkonsentrasi

atau berspesialisasi pada sektor yang memiliki pertumbuhan yang lebih cepat pada perekonomian Sulawesi Utara.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perekonomian Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro mengalami perkembangan atau peningkatan pasca berotonomi. Untuk itu disarankan agar perencanaan pembangunan daerah hendaknya menitikberatkan pada sektor-sektor basis atau sektor yang memiliki keunggulan komparatif serta mengembangkan sektor yang memiliki daya saing yang tinggi. Selain itu, peran Pemerintah Daerah lebih ditingkatkan dalam penyediaan jasa publik bagi masyarakat yang dapat memberikan multiplier efek yang luas bagi pengembangan ekonomi daerah.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

2.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Menganalisis potensi sektor-sektor di Propinsi Jawa Tengah
- b. Menganalisis daya saing komoditas unggulan pada perekonomian Propinsi Jawa Tengah.
- c. Menganalisis peluang dan kekuatan Propinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan daya saing ekonominya

2.2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam melakukan studi ini adalah mengetahui kondisi sebaran perekonomian Propinsi Jawa Tengah sehingga diketahui potensi, peluang dan masalah-masalah yang timbul dalam proses pembangunan yang selanjutnya dapat dirumuskan strategi dan rekomendasi kebijakan yang sesuai untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah terutama setelah diberlakukannya era otonomi daerah. Untuk akademisi, penelitian ini merupakan langkah kongkrit dalam mengaplikasikan teori-teori ekonomi pembangunan kedalam kondisi riil yang terjadi dalam perekonomian.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1. Data dan Variabel

Data penelitian diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah, Kementerian Perdagangan dan juga didukung oleh studi di perpustakaan. Rentang periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2010 sampai 2012.

4.2. Metode Analisis

Untuk melihat struktur perekonomian Propinsi Jawa Tengah akan dipergunakan 3 (tiga) metode. Metode *pertama* adalah metode *Location Quotient* (LQ) yang digunakan untuk mengetahui potensi sektor, sub sektor dan produk yang terdapat di Propinsi Jawa Tengah. Metode *kedua* adalah *Revealed Competitive Analysis* (RCA) yaitu suatu metode yang digunakan untuk menentukan komoditas dimana suatu daerah itu mempunyai keunggulan komparatif dibanding daerah lain dalam teori perdagangan. Metode *ketiga* adalah analisis SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats*) yang digunakan untuk mengevaluasi kesempatan dan tantangan di lingkungan bisnis atau lingkungan internal pemerintah daerah.

4.2.1. *Location Quotient (LQ)*

Metode *location quotient* (LQ) sektoral wilayah digunakan untuk mengetahui potensi sektor, subsektor, dan produk yang terdapat di suatu wilayah. Menurut Hood (1998), LQ adalah suatu alat pengembangan ekonomi yang sederhana dengan segala kelebihan dan keterbatasan. Teknik LQ merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami sektor kegiatan yang menjadi pemacu pertumbuhan. LQ mengukur konsentrasi relatif atau derajat spesialisasi kegiatan ekonomi melalui pendekatan perbandingan.

Teknik analisis LQ juga memiliki filosofi pembangunan yang dianut adalah *trickle down effect* artinya untuk efisiensi pemerintah daerah akan mengalokasikan dananya pada sektor yang kuat dengan harapan sektor yang kuat itu akan menularkan pertumbuhannya pada sektor yang kurang kuat. Kalau pemerintah daerah kurang yakin bahwa filosofi *trickle down effect* ini berjalan, maka memang sektor-sektor non-basis yang harus lebih diutamakan.

Teknik kuosien lokasi yang digunakan untuk menentukan sektor basis ada beberapa macam antara lain:

a. Kuosien Lokasi atas dasar tenaga kerja per sektor dengan rumus:

$$LQ = \frac{\frac{X_{ij}}{X_j}}{\frac{Y_i}{Y}}$$

dimana LQ = Indeks kuosien lokasi; X_{ij} = Jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor i di propinsi j; X_j = Jumlah total tenaga kerja di propinsi j; Y_i = Jumlah

tenaga kerja di sektor i di negara atau daerah acuan lain dan Y = Jumlah total tenaga kerja di negara atau daerah acuan lain.

b. Kuosien Lokasi atas dasar PDRB dengan rumus :

$$LQ = \frac{\frac{X_{ij}}{X_j}}{\frac{Y_i}{Y}}$$

dimana LQ = Indeks kuosien lokasi; X_{ij} = Nilai PDRB sektor i di propinsi j; X_j = Nilai PDRB total propinsi j; Y_i = Nilai PDRB sektor i di negara atau daerah acuan lain; dan Y = Nilai PDRB total negara atau daerah acuan lain.

Makna kuosien lokasi baik atas dasar tenaga kerja maupun PDRB adalah :

- Jika $LQ > 1$ maka suatu sektor dikatakan sektor basis
- Jika $LQ = 1$ maka dikatakan suatu sektor mendekati sebagai sektor basis.
Beberapa peneliti mengategorikan sektor yang LQ nya = 1 adalah sektor basis
- Jika $LQ < 1$ maka suatu sektor bukan merupakan sektor basis

c. Kuosien Lokasi Atas Dasar Komoditas atau Produksi Suatu Wilayah

Kuosien jenis ini memang tidak dipakai untuk menentukan sektor basis tetapi biasanya digunakan untuk menentukan apakah komoditas yang merupakan hasil suatu wilayah merupakan komoditas unggulan atau tidak. Adapun rumus yang dipakai adalah:

$$LQ = \frac{\frac{X_{ij}}{X_j}}{\frac{Y_i}{Y}}$$

dimana LQ = Indeks kuosien lokasi; X_{ij} = Nilai produksi komoditas i di suatu sektor/sub sektor di propinsi j ; X_j = Nilai produksi total semua komoditas di suatu sektor/sub sektor propinsi j dan Y_i = Nilai produksi komoditas i di suatu sektor/sub sektor di negara atau daerah acuan lain.

Makna kuosien lokasi baik atas dasar nilai produksi suatu komoditas adalah :

- Jika $LQ > 1$ maka komoditas tersebut merupakan komoditas unggulan suatu wilayah
- Jika $LQ = 1$ maka dikatakan suatu komoditas mendekati sebagai komoditas unggulan suatu wilayah. Komoditas yang LQ -nya=1 dikategorikan sebagai komoditas unggulan
- Jika $LQ < 1$ maka komoditas tersebut bukan merupakan komoditas unggulan

Studi ini menggunakan pendekatan kedua yaitu LQ berdasarkan PDRB karena lebih mencerminkan kinerja sektoral daerah.

4.2.2. Analisis SWOT

Analisis SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats*) biasanya digunakan untuk mengevaluasi kesempatan dan tantangan di lingkungan bisnis atau lingkungan internal perusahaan (Kuncoro, 2004). SWOT juga dapat digunakan untuk melihat kondisi perekonomian suatu daerah. Untuk memudahkan dalam melakukan analisis SWOT maka diperlukan matriks SWOT sehingga dapat dirumuskan berbagai strategi yang diperlukan masing-masing unsur. Matriks SWOT dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Matriks Analisis SWOT

	STRENGTH (S) Daftar semua kekuatan yang dimiliki	WEAKNESS (W) Daftar semua kelemahan yang dimiliki
OPPORTUNITIES (O) Daftar semua peluang yang dapat diidentifikasi	Strategi SO Gunakan semua kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada	Strategi WO Daftar semua kekuatan yang dimiliki
THREATS (T) Daftar semua ancaman yang dapat diidentifikasi	Strategi ST Gunakan semua kekuatan untuk menghindari dari semua ancaman	Strategi WT Tekan semua kelemahan dan cegah semua ancaman

Sumber: Kuncoro (2004)

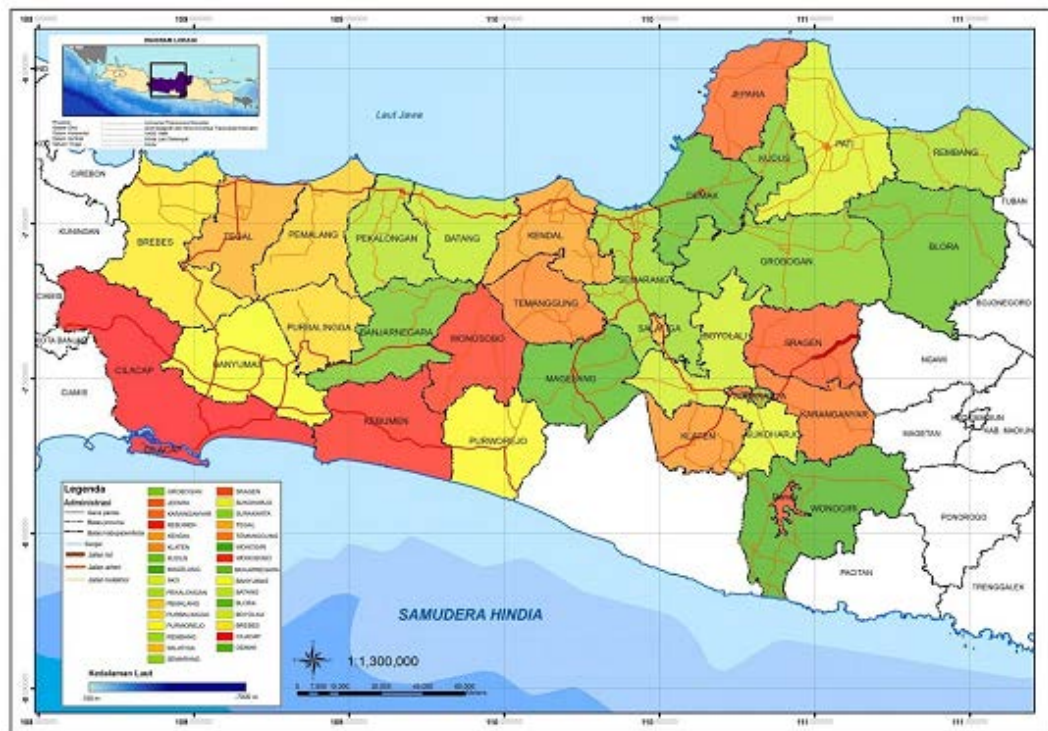
Pada dasarnya alternatif strategi yang diambil harus diarahkan pada usaha-usaha untuk menggunakan kekuatan dan memperbaiki kelemahan, memanfaatkan peluang-peluang ekonomi serta mengantisipasi ancaman. Dari matriks SWOT tersebut akan diperoleh empat kelompok strategi, yaitu strategi SO, strategi WO, strategi ST, dan strategi WT. Melalui matriks strategi SWOT tersebut, kemudian dilakukan *positioning*, untuk mengukur posisi Propinsi Jawa Tengah yang bersangkutan dengan perekonomian. Mengingat aspek internal dan eksternal terhadap perekonomian Propinsi Jawa Tengah maka pembobotan dilakukan dari yang paling berpengaruh sampai yang paling tidak berpengaruh.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Jawa Tengah Dari Sisi Geografis Dan Demografi

Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi di Jawa, letaknya diapit oleh dua provinsi besar, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Letaknya antara 5°40' dan 8°30' Lintang Selatan dan antara 108°30' dan 111°30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 km dan dari Utara ke Selatan 226 km (tidak termasuk Pulau Karimunjawa).



Gambar 5.1. Peta Wilayah Jawa Tengah

Propinsi Jawa Tengah memiliki 29 kabupaten dan 6 kota. Ibu kotanya adalah Semarang. Administrasi pemerintahan kabupaten dan kota ini terdiri atas 545 kecamatan dan 8.490 desa/kelurahan. Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, Jawa Tengah juga terdiri atas 3 kota administratif, yaitu Kota Purwokerto, Kota Cilacap, dan Kota Klaten. Namun sejak diberlakukannya Otonomi Daerah tahun 2001 kota-kota administratif tersebut dihapus dan menjadi bagian dalam wilayah kabupaten. Menyusul otonomi daerah, 3 kabupaten memindahkan pusat pemerintahan ke wilayahnya sendiri, yaitu Kabupaten Magelang (dari Kota Magelang ke Mungkid), Kabupaten Tegal (dari Kota Tegal ke Slawi), serta Kabupaten Pekalongan (dari Kota Pekalongan ke Kajen). Nama kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah beserta jumlah kecamatannya terdapat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1. Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah

No.	Kabupaten/Kota	Pusat Pemerintahan	Kecamatan
1.	Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	20
2.	Kab. Banyumas	Purwokerto	27
3.	Kab. Batang	Batang	15
4.	Kab. Blora	Blora	16
5.	Kab. Boyolali	Boyolali	19
6.	Kab. Brebes	Brebes	17
7.	Kab. Cilacap	Cilacap	24
8.	Kab. Demak	Demak	14
9.	Kab. Grobogan	Purwodadi	19
10.	Kab. Jepara	Jepara	14
11.	Kab. Karanganyar	Karanganyar	17
12.	Kab. Kebumen	Kebumen	26
13.	Kab. Kendal	Kendal	20
14.	Kab. Klaten	Klaten	26
15.	Kab. Kudus	Kudus	9
16.	Kab. Magelang	Mungkid	21

No.	Kabupaten/Kota	Pusat Pemerintahan	Kecamatan
17.	Kab. Pati	Pati	21
18.	Kab. Pekalongan	Kajen	19
19.	Kab. Pemalang	Pemalang	14
20.	Kab. Purbalingga	Purbalingga	18
21.	Kab. Purworejo	Purworejo	16
22.	Kab. Rembang	Rembang	14
23.	Kab. Semarang	Ungaran	18
24.	Kab. Sragen	Sragen	20
25.	Kab. Sukoharjo	Sukoharjo	12
26.	Kab. Tegal	Slawi	18
27.	Kab. Temanggung	Temanggung	20
28.	Kab. Wonogiri	Wonogiri	25
29.	Kab. Wonosobo	Wonosobo	15
30.	Kota Magelang	-	3
31.	Kota Pekalongan	-	4
32.	Kota Salatiga	-	4
33.	Kota Semarang	-	16
34.	Kota Surakarta (Solo)	-	5
35.	Kota Tegal	-	4

Sumber : BPS, 2013

Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota. Luas wilayah Jawa Tengah pada tahun 2010 tercatat sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa (1,70 persen dari luas Indonesia). Luas yang ada, terdiri dari 992 ribu hektar (30,47 persen) lahan sawah dan 2,26 juta hektar (69,53 persen) bukan lahan sawah. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, luas lahan sawah tahun 2010 turun sebesar 0,013 persen, sebaliknya luas bukan lahan sawah naik sebesar 0,006 persen.

Menurut penggunaannya, persentase lahan sawah yang berpengairan teknis adalah 39,03 persen, tadah hujan 27,47 persen dan lainnya berpengairan setengah teknis, sederhana, dan lain-lain. Dengan menggunakan teknik irigasi yang baik, potensi lahan sawah yang dapat ditanami padi lebih dari dua kali sebesar

78,70 persen. Berikutnya, lahan kering yang dipakai untuk tegal/kebun sebesar 31,83 persen dari total bukan lahan sawah. Persentase itu merupakan yang terbesar, dibanding persentase penggunaan bukan lahan sawah lain.

Berdasarkan Angka Sementara Proyeksi Sensus Penduduk (SP) 2010, jumlah penduduk Jawa Tengah pada tahun 2011 tercatat sebesar 32,64 juta jiwa atau sekitar 13,54 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Ini menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi ketiga di Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Ini ditunjukkan oleh rasio jenis kelamin (rasio jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan) sebesar 99,42

Penduduk Jawa Tengah belum menyebar secara merata di seluruh wilayah Jawa Tengah. Umumnya penduduk banyak menumpuk di daerah kota dibandingkan kabupaten. Secara rata-rata kepadatan penduduk Jawa Tengah tercatat sebesar 1.003 jiwa setiap kilometer persegi, dan wilayah terpadat adalah Kota Surakarta dengan tingkat kepadatan sekitar 11 ribu orang setiap kilometer persegi. Jumlah rumahtangga sebesar 8,9 juta pada tahun 2011 sedangkan rata-rata penduduk per rumahtangga di Jawa Tengah tercatat sebesar 3,7 jiwa.

Berdasarkan hasil Sakernas, angkatan kerja di Jawa Tengah tahun 2011 mencapai 16,92 juta orang atau naik sebesar 0,37 persen dibanding tahun sebelumnya. Tingkat partisipasi angkatan kerja penduduk Jawa Tengah tercatat sebesar 70,77 persen. Sedangkan angka pengangguran terbuka di Jawa Tengah sebesar 5,93 persen.

Bila dibedakan menurut status pekerjaan utamanya, buruh/karyawan sebesar 28,19 persen. Status pekerjaan ini lebih besar dibanding status pekerjaan lain. Sedangkan berusaha sendiri tanpa dibantu orang lain, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, berusaha sendiri dibantu buruh tetap dan pekerja lainnya masing-masing tercatat sebesar 16,12 persen, 21,19 persen, 2,97 persen dan 31,53 persen. Sektor tersier dimasuki sekitar 39,50 persen pekerja dan merupakan sektor terbanyak menyerap pekerja. Hal ini dikarenakan sektor tersebut tidak memerlukan pendidikan khusus. Sektor lainnya yaitu sektor primer dan sektor sekunder, masing-masing menyerap tenaga kerja sebesar 34,46 persen dan 26,04 persen.

5.2. Jawa Tengah Dari Perspektif Ekonomi

Di Jawa Tengah tahun 2011 tercatat sebanyak 1.561 unit pasar tradisional, departemen store 53 unit, pasar swalayan 589 unit dan 26 pusat perbelanjaan. pada tahun 2011 menurut Dinas Perdagangan, jumlah Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) menurut skala usaha tercatat 356.999 perusahaan. Pada keadaan yang sama, jumlah perusahaan yang mendapat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) naik 12,61 persen dari 24.572 perusahaan pada tahun 2010 menjadi 27.874 perusahaan pada tahun 2011.

Berikutnya untuk jumlah anggota Kadinda tahun 2011 (Kualifikasi B, M, K1, K2, GEL) sebanyak 232 perusahaan. Dari jumlah tersebut terbagi ke dalam perusahaan kualifikasi B (nilai pekerjaan di atas 1 milyar rupiah) sebanyak 53 perusahaan, kualifikasi M (nilai pekerjaan di atas 500 juta sampai 1 milyar

rupiah) sebanyak 51 perusahaan, dan K2 (nilai pekerjaan di atas 15 juta sampai 200 juta rupiah) sebanyak 126 perusahaan.

Dari sisi ekonomi, perolehan devisa sektor minyak dan gas (migas) yang cenderung menurun, telah memacu sektor non migas untuk berkembang. Hal tersebut ditunjukkan oleh besarnya nilai ekspor Jawa Tengah pada tahun 2011 yang mencapai 4,69 milyar dolar Amerika, terdiri dari ekspor migas sebesar 432 juta dolar Amerika (9,21 persen) dan ekspor non migas sebesar 4,26 milyar dolar Amerika (90,79 persen). Jika dibandingkan tahun sebelumnya nilai ekspor Jawa Tengah mengalami kenaikan sebesar 21,27 persen.

Sementara itu realisasi nilai impor Jawa Tengah tahun 2011 mencapai 13.027,1 milyar dolar Amerika. Nilai impor tersebut mengalami kenaikan sebesar 35,06 persen dari tahun 2010 (Januari-Desember). Dari data yang ada, nampak bahwa nilai impor selama lima tahun (2007 - 2011) masih cenderung lebih tinggi dibanding nilai ekspor, padahal yang diharapkan akan berlaku sebaliknya sehingga akan memperbesar penerimaan devisa.

Koperasi sebagai 'soko guru' perekonomian Indonesia, fungsinya semakin diperhatikan dalam berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Jawa Tengah antara lain, melakukan pemberian bantuan modal kepada koperasi dan pengusaha kecil dalam bentuk pinjaman, pembinaan koperasi di daerah perdesaan/perkotaan, pembentukan Forum Koordinasi Pembinaan Koperasi dan Pengusaha Kecil (FKPPK). Sampai dengan tahun 2011 terdapat 26.347 unit koperasi di Jawa Tengah dengan jumlah anggota seluruhnya sekitar 5,21 juta orang. Secara

umum volume usaha mengalami kenaikan sedangkan sisa hasil usaha mengalami penurunan.

5.3. PDRB Jawa Tengah menurut Sektor

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2011 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2000, lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yaitu 6,01 persen (2010 = 5,84 persen). Hal tersebut cukup beralasan mengingat kondisi perekonomian relatif terus membaik sejak terjadinya krisis global tahun 2008.

Pertumbuhan riil sektoral tahun 2011 mengalami fluktuasi dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 8,56 persen, namun peranannya terhadap PDRB hanya sekitar 5,85 persen. Sektor pertanian ternyata mengalami pertumbuhan yang paling rendah pada tahun 2011, yaitu sebesar 1,31 persen.

Sektor industri pengolahan masih memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Jawa Tengah yaitu sebesar 33,31 persen, dengan laju pertumbuhan sebesar 6,74 persen. Sektor perdagangan, hotel dan restoran yang juga merupakan sektor dominan memberikan sumbangan bagi perekonomian Jawa Tengah sebesar 19,71 persen dengan pertumbuhan riil sebesar 7,53 persen. Sektor pertanian mengalami pertumbuhan sebesar 1,33 persen, masih mempunyai peranan yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi, karena mampu memberi andil sebesar 19,07 persen.

Dari angka-angka indeks implisit PDRB dapat diketahui kenaikan harga dari waktu ke waktu baik secara agregat maupun secara sektoral. Secara agregat indeks implisit di Jawa Tengah tahun 2011 sebesar 251,54. Sedangkan secara sektoral, pertumbuhan indeks implisit yang paling cepat atau di atas angka rata-rata indeks implisit Jawa Tengah pada tahun 2011 terjadi pada sektor listrik dan air bersih sebesar 295,94 persen. Sektor lain yang perkembangan indeks implisitnya paling lamban adalah sektor pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 215,43 persen.

Pada tahun 2011, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku mencapai 15,4 juta rupiah, naik 11,97 persen dari tahun sebelumnya. Sementara untuk PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2000 mencapai 6,1 juta rupiah atau meningkat 5,86 persen.

5.4. PDRB Jawa Tengah menurut Komponen Penggunaan

PDRB menurut komponen penggunaan terdiri dari konsumsi rumahtangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal serta ekspor dan impor barang dan jasa. PDRB dari sudut penggunaan yang terbesar adalah untuk pengeluaran konsumsi rumahtangga. Menurut harga berlaku tahun 2011, konsumsi rumahtangga mempunyai kontribusi 64,26 persen dari total PDRB Provinsi Jawa Tengah atau senilai 320.409,0 milyar rupiah. Dibandingkan tahun sebelumnya nilai tersebut naik 12,23 persen. Jika didasarkan harga konstan tahun 2000 nilainya mencapai 128.163,3 milyar rupiah, naik sebesar 6,59 persen dari tahun 2010.

Konsumsi pemerintah yang dipakai untuk penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah serta pertahanan dan keamanan, tahun 2010 atas dasar harga berlaku sebesar 50.690,6 milyar rupiah, naik menjadi 56.261,3 milyar rupiah pada tahun 2011 atau meningkat 10,99 persen. Jika diukur berdasarkan harga konstan 2000, konsumsi pemerintah tahun 2011 naik 7,75 persen dari tahun 2010.

Penggunaan lain yang cukup besar dari Produk Domestik Regional Bruto adalah untuk pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Menurut harga berlaku, tahun 2011 mencapai 92.102,4 milyar rupiah, dan sebesar 37.027,1 milyar rupiah atas dasar harga konstan 2000. PMTB atas dasar harga berlaku meningkat sebesar 7,93 persen, sementara atas dasar harga konstan tahun 2000 naik 7,60 persen.

Investasi yang ditanamkan di berbagai sektor ekonomi berhasil meningkatkan produksi. Meningkatnya produksi akan lebih mendorong ekspor. Nilai ekspor yang dicapai Jawa Tengah pada tahun 2010 mencapai 200.745,5 milyar rupiah, meningkat menjadi 222.331,7 milyar rupiah pada tahun 2011. Kegiatan ekspor ke luar negeri sebesar 19,87 persen dari total nilai ekspor. Sedangkan nilai ekspor atas dasar konstan 2000 sebesar 99.498,9 milyar rupiah.

Nilai impor barang dan jasa masih di bawah kegiatan ekspor. Pada tahun 2011, nilai impor atas dasar harga berlaku mencapai 215.085,1 milyar rupiah, naik 18,75 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk nilai impor atas dasar harga konstan 2000 mengalami peningkatan sebesar 10,72 persen atau tercatat sebesar 94.150,4 milyar rupiah.

5.5. Hasil Perhitungan LQ

Hasil perhitungan LQ menunjukkan bahwa setidaknya terdapat empat sektor di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki nilai $LQ > 1$ antara lain sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor listrik dan air bersih dan sektor perdagangan, hotel serta restoran. Hal ini mengindikasikan bahwa hampir separuh sektor di Provinsi Jawa Tengah dapat menjadi sektor basis bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Selama kurun waktu 2010-2012, perekonomian sektoral Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kinerja keunggulan komoditas yang dapat dipertahankan secara konsisten. Hasil ini tidak lepas dari kenyataan bahwa kabupaten-kabupaten yang masuk kedalam Provinsi Jawa Tengah merupakan kecamatan kunci yang justru memberikan nilai tambah paling besar terhadap perekonomian Jawa Tengah.

Besarnya nilai $LQ > 1$ di pada empat sektor juga mengindikasikan bahwa produksi output Jawa Tengah mengalami surplus atau memproduksi output melebihi proporsi yang dibutuhkan provinsi dan memberikan sumbangan output bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, sektor-sektor tersebut dapat menjadi sektor basis atau sektor kunci bagi pengembangan sektor lainnya. Sektor basis utama di provinsi ini adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan nilai rata-rata LQ sebesar 1,44. Tabel perhitungan selengkapnya disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 5.2. Hasil Perhitungan LQ

No.	LAPANGAN USAHA	JAWA TENGAH			INDONESIA			HASIL PERHITUNGAN		
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	LQ2010	LQ2011	LQ2012
1	Pertanian	86.665,68	95.078,35	104.311,42	985.470,50	1.091.447,30	1.190.412,40	1,2755	1,2964	1,2978
2	Pertambangan dan Penggalian	4.302,56	4.726,49	5.239,59	719.710,10	979.505,40	970.599,60	0,0867	0,0718	0,0800
3	Industri Pengolahan	146.132,83	165.860,52	182.715,24	1.599.073,10	1.806.140,50	1.972.846,60	1,3255	1,3666	1,3717
4	Listrik dan Air Bersih	4.465,49	5.110,06	5.648,69	49.119,00	56.788,90	65.124,90	1,3186	1,3391	1,2846
5	Bangunan	27.124,58	29.851,90	33.352,51	660.890,50	754.483,50	860.964,80	0,5953	0,5888	0,5737
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	86.998,49	98.462,08	112.908,72	882.487,20	1.024.009,10	1.145.600,90	1,4299	1,4310	1,4597
7	Pengangkutan dan Komunikasi	26.298,75	29.172,04	32.951,09	423.172,20	491.283,10	549.115,50	0,9014	0,8837	0,8888
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	15.899,73	17.684,05	19.993,41	466.563,80	535.152,90	598.523,20	0,4943	0,4918	0,4947
9	Jasa-jasa	46.599,86	52.828,32	59.359,20	660.365,50	783.970,50	888.676,40	1,0235	1,0028	0,9893
	PDRB/PDB	444.487,97	498.773,81	556.479,87	6.446.851,90	7.422.781,20	8.241.864,30			

Sumber : data diolah

Hasil perhitungan untuk sektor pertanian mengindikasikan bahwa sektor perdagangan, hotel dan restoran berpotensi menjadi sektor basis karena memiliki nilai LQ lebih besar dari 1 dengan perincian untuk tahun 2010 sebesar 1,429, tahun 2011 sebesar 1,431 dan untuk tahun 2012 sebesar 1,284. Hasil ini mengindikasikan keberhasilan Provinsi Jawa Tengah dalam sektor perdagangan hotel dan jasa. Tingginya potensi ini terutama disumbang oleh sub sektor perdagangan, perhotelan dan restoran yang kian semarak.

Jawa Tengah juga banyak terdapat obyek wisata yang sangat menarik baik wisata alam maupun wisata budaya. Salah satu dari tujuh keajaiban dunia terletak di Provinsi Jawa Tengah ini yaitu Candi Borobudur. Candi Borobudur terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Lokasi candi adalah kurang lebih 100 km di sebelah barat daya Semarang, 86 km di sebelah barat Surakarta, dan 40 km di sebelah barat laut Yogyakarta. Borobudur kini masih digunakan sebagai tempat ziarah keagamaan; tiap tahun umat Buddha yang datang dari seluruh Indonesia dan mancanegara berkumpul di Borobudur untuk memperingati Trisuci Waisak. Dalam dunia pariwisata, Borobudur adalah obyek wisata tunggal.

Tidak hanya pariwisata budaya, di Provinsi Jawa Tengah juga terdapat wisata alam yang sangat menarik seperti Kepulauan Karimunjawa. Kepulauan Karimunjawa terletak pada 05°40'-05°57' LS dan 110°40' BT secara geografis terletak di Laut Jawa, arah barat laut dari Jepara. Luas wilayah teritorial Karimunjawa 107.225 ha sebagian besar berupa lautan (100.105 ha) dengan luas daratan 7.120 ha yang terdiri atas gugusan pulau berjumlah 27 pulau besar dan kecil. Selain itu, Provinsi Jawa

Tengah juga memiliki Perbukitan Dieng. Dieng terletak di lahan situs purbakala seluas 36 Ha, kawasan ini dikelilingi perbukitan. Sebelah timur Bukit Setinggi dan Sikendeng, sebelah barat bukit Ngrecogede, sebelah selatan bukit pangonan dan sebelah utara bukit punthuksari.

Keberadaan sejumlah kawasan wisata ini memberikan ruang bagi kaum pebisnis untuk mengembangkan kegiatan perdagangan, membangun hotel dan restoran dan berbagai bisnis penunjang pariwisata. Jumlah hotel yang dibangun di Jawa Tengah juga mengalami peningkatan yang signifikan.

Sektor lain yang memiliki potensi yang bisa dikembangkan adalah sektor industri pengolahan yang memiliki nilai perhitungan LQ sebesar 1,325 pada tahun 2010, 1,366 pada tahun 2011 dan 1,1,372 pada tahun 2012. Kinerja sektor ini didukung oleh kemampuan provinsi Jawa Tengah dalam menghasilkan mengelola industri kecil, industri menengah dan besar. Pengembangan komoditi unggulan UMKM di Provinsi Jawa Tengah juga menjadi daya tarik untuk dikunjungi. Pada dasarnya terbagi ke dalam 3 sektor utama yakni industri, pertanian, dan pariwisata. Pengembangan komoditi unggulan ini umumnya berbasis klaster.

Pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa Tengah sudah memadai, hal ini dapat dilihat dari potensi infrastruktur posisi Jawa Tengah ada pada urutan keempat setelah DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bahkan terus melakukan percepatan pembangunan Jawa Tengah dengan salah satu fokus utamanya pada pembangunan infrastruktur. Penyediaan infrastruktur khususnya jalan memang mempunyai korelasi positif terhadap perekonomian Jawa

Tengah secara keseluruhan. Pembangunan infrastruktur jalan provinsi dan kabupaten akan menjadi pendorong yang signifikan dalam meningkatkan aktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat.

Tabel 5.3. Jumlah Wisatawan ke Obyek Wisata di Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten	Jenis Objek Wisata	Wisatawan Domestik	Wisatawan Mancanegara
Kabupaten Banjarnegara	Semua Objek Wisata	35448	0
Kabupaten Banyumas	Semua Objek Wisata	556001	2230
Kabupaten Batang	Semua Objek Wisata	45135	4
Kabupaten Blora	Semua Objek Wisata	56166	200
Kabupaten Boyolali	Semua Objek Wisata	52685	0
Kabupaten Brebes	Semua Objek Wisata	47736	15
Kabupaten Cilacap	Semua Objek Wisata	126204	1664
Kabupaten Demak	Semua Objek Wisata	36971	0
Kabupaten Grobogan	Semua Objek Wisata	82922	86
Kabupaten Jepara	Semua Objek Wisata	54174	2144
Kabupaten Karanganyar	Semua Objek Wisata	296869	2092
Kabupaten Kebumen	Semua Objek Wisata	94373	78
Kabupaten Kendal	Semua Objek Wisata	88888	0
Kabupaten Klaten	Semua Objek Wisata	88847	143
Kabupaten Kudus	Semua Objek Wisata	122286	713
Kabupaten Magelang	Semua Objek Wisata	33684	29239
Kabupaten Pati	Semua Objek Wisata	130972	31
Kabupaten Pekalongan	Semua Objek Wisata	18866	0
Kabupaten Pemalang	Semua Objek Wisata	26091	0
Kabupaten Purbalingga	Semua Objek Wisata	26605	3
Kabupaten Purworejo	Semua Objek Wisata	47717	37
Kabupaten Rembang	Semua Objek Wisata	41146	85
Kabupaten Semarang	Semua Objek Wisata	867077	216
Kabupaten Sragen	Semua Objek Wisata	41443	0
Kabupaten Sukoharjo	Semua Objek Wisata	82855	51
Kabupaten Tegal	Semua Objek Wisata	69465	0
Kabupaten Temanggung	Semua Objek Wisata	64073	0
Kabupaten Wonogiri	Semua Objek Wisata	30204	6
Kabupaten Wonosobo	Semua Objek Wisata	104441	10409
Kota Magelang	Semua Objek Wisata	95294	370

Kota Pekalongan	Semua Objek Wisata	109059	146
Kota Salatiga	Semua Objek Wisata	74285	506
Kota Semarang	Semua Objek Wisata	1067050	18512
Kota Surakarta	Semua Objek Wisata	948334	9127
Kota Tegal	Semua Objek Wisata	180745	233

5.6. Hasil Analisis SWOT

Provinsi Jawa Tengah sebenarnya memiliki potensi untuk meningkatkan daya saing perekonomiannya. Beberapa kajian mengindikasikan banyaknya peluang yang dimiliki Jawa Tengah untuk mengeksplorasi segala kekuatan yang dimilikinya agar pendapatan perkapitanya meningkat. Tabel 5.4 menerangkan analisis SWOT untuk Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 5.4. Penerapan Analisis SWOT untuk Propinsi Jawa Tengah

	<i>STRENGTH (S)</i>	<i>WEAKNESS (W)</i>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sektor basis yang produktif 2. Memiliki sub sektor industri yang potensial 3. SDM dan ketenagakerjaan yang terlatih 4. Memiliki potensi wisata yang tinggi 5. Memiliki lokasi yang strategis karena berada ditengah pulau Jawa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya eksplorasi sektor wisata 2. Infrastruktur menuju tempat wisata masih kurang 3. Investasi yang masih perlu ditingkatkan 4. Pendapatan perkapita masih rendah 5. Birokrasi yang memakan waktu lama 6. Lapangan pekerjaan masih relatif sedikit sehingga banyak tenaga kerja migrasi

<p>OPPORTUNITIES (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi penerimaan dari sektor wisata yang tinggi 2. Potensi perekonomian daerah meningkat 3. Banyak tenaga kerja usia muda 4. Kenaikan rata-rata pendapatan perkapita 5. Peningkatan ekspor kerajinan 6. Masih banyak lapangan kerja yang bisa digali 	<p>STRATEGI SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menembangkan infrastruktur terutama menuju daerah wisata 2. Meningkatkan perekonomian daerah 3. Secara agresif meningkatkan pendapatan perkapita daerah 4. Berkembangnya industri kecil dan menengah seperti batik, kerajinan ukiran 	<p>STRATEGI WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan infrastuktur terutama menuju lokasi wisata 2. Pemberian insentif guna terciptanya lapangan kerja untuk mengurangi masalah pengangguran 3. Perlu penyederhanaan birokrasi untuk menarik investor terutama sektor wisata seperti pembangunan hotel
<p>THREATS (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi wisata daerah lain yang lebih menarik 2. Banyak lapangan kerja di daerah lain sehingga mendorong tenaga kerja <i>skilled</i> migrasi 3. Upah tenaga kerja didaerah lain yang lebih tinggi 	<p>STRATEGI ST</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan potensi wisata daerah dengan membangun infrastuktur yang memadai 2. Sub sektor informal perlu digalakkan dan terus dibina oleh pemerintah dengan pemberian kredit lunak serta pembinaan ketrampilan 	<p>STRATEGI WT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu penciptaan lapangan kerja di daerahsperdesaan sehingga mengurangi urbanisasi 2. Penyederhanaan birokrasi untuk menarik minat investor sehingga memberikan peluang lapangan pekerjaan

Sumber: berbagai literatur

Dari analisis SWOT diketahui bahwa beberapa potensi Jawa Tengah yang bisa digali antara lain potensi penerimaan dari sektor wisata yang tinggi. Hasil kajian menunjukkan bahwa Jawa Tengah memiliki potensi wisata yang cukup tinggi untuk dikelola oleh Pemda. Kawasan wisata tersebut memerlukan penanganan serius untuk

bisa dikembangkan apabila didukung oleh jaringan infrastruktur yang memadai, kemudahan akses menuju kesana, keberadaan hotel dan restoran yang mendukung. Apabila hal ini dipenuhi maka tidak mustahil perekonomian daerah akan meningkat.

Data statistik menunjukkan bahwa masih banyak tenaga kerja pada usia muda. Dengan demikian, untuk menghindari meledaknya arus urbanisasi maka kawasan sektor perdesaan harus dikembangkan. Apabila saat ini kegiatan panen taman hanya bersifat tradisional maka selanjutnya pemerintah melalui Dinas Pertanian harus memberikan pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan sektor pertanian. Misalnya pengembangan pertanian melalui agro industri atau pengembangan pertanian organik. Apabila saat ini harga pupuk kimia sangat tinggi maka petani bisa mengolah sampah organik dan kotoran ternak menjadi pupuk. Dengan demikian maka sampah dari hewan dan tumbuhan memiliki dua manfaat antara lain mengurangi volume sampah dan efisiensi biaya karena petani tidak perlu memberi pupuk kimia untuk produk pertanian mereka.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan ekspor pertanian. Jawa Tengah dikenal mempunyai keunggulan dalam kerajinan. Banyaknya industri ukir di Jepara patut dikembangkan. Jepara memiliki banyak pengrajin yang membuat furniture yang kualitasnya sangat baik. Pengrajin pengrajin ini harus terus dibina untuk tetap meningkatkan kualitas produksinya agar bisa diekspor keluar negeri. Oleh karena itu standar produknya harus premium untuk meningkatkan harganya.

BAB VI

RENCANA PENELITIAN BERIKUTNYA

Rencana pengembangan penelitian pada tahun berikutnya adalah :

1. Memetakan keunggulan komparatif yang dimiliki Jawa Tengah yang didasarkan hasil analisis.
2. Melakukan benchmarking study dengan provinsi lain yang memiliki pendapatan asli daerah yang lebih tinggi
3. Membuat rencana pengembangan strategi yang bisa dilakukan oleh provinsi Jawa Tengah yang didasarkan atas hasil analisis daya saing.

BAB VII

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

7.1. Kesimpulan

Dari hasil perhitungan yang sudah dilakukan, bisa disimpulkan bahwa empat sektor di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki nilai $LQ > 1$ antara lain sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor listrik dan air bersih dan sektor perdagangan, hotel serta restoran. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hampir separuh sektor di Provinsi Jawa Tengah dapat menjadi sektor basis bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Selama kurun waktu 2010-2012, perekonomian sektoral Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kinerja keunggulan komoditas yang dapat dipertahankan secara konsisten. Hasil ini tidak lepas dari kenyataan bahwa kabupaten-kabupaten yang masuk kedalam Provinsi Jawa Tengah merupakan kecamatan kunci yang justru memberikan nilai tambah paling besar terhadap perekonomian Jawa Tengah.

Jawa Tengah juga memiliki potensi yang bisa dikembangkan seperti industri ukir di Jepara. Pola penanganan yang intensif dan terpadu pada industri ini diyakini akan bisa menjaga kualitas produk ukir sehingga membuka potensi untuk ppasar ekspr dengan harga bersaing. Dengan demikian pemerintah daerah harus selalu menciptakan iklim yang kondusif yang membuat industri daerah maju dan pproduknya memiliki kualitas baik.

7.2. Implikasi Kebijakan

Jawa Tengah ssebenarnya memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Beberapa strategi yang bisa meningkatkan potensi daerah antara lain adalah :

1. Meningkatkan potensi wisata daerah dengan membangun infrastuktur yang memadai.
2. Membuka kran investasi terutama yang mendukung keunggulan daerah yaitu sektor pariwisata. Banyaknya invesotr terutama bidang perhotelan, perdagangan dan jasa diyakini akan mampu menyerap tenaga kerja daerah.
3. Sub sektor informal perlu digalakkan dan terus dibina oleh pemerintah dengan pemberian kredit lunak serta pembinaan
4. Perlu penciptaan lapangan kerja di daerahsperdesaan sehingga mengurangi urbanisasi
5. Penyederhanaan birokrasi untuk menarik minat investor sehingga memberikan peluang lapangan pekerjaan

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2013. Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah Koridor Jawa. Didownload dari http://navperencanaan.com/appe/potensipariwisata/index?prov_code=jateng pada tanggal 23 September 2013
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi daerah*. BPF. Yogyakarta.
- Azis, Iwan Jaya. 1994. *Ilmu Ekonomi regional dan Beberapa aplikasinya Di Indonesia*. Lembaga Penerbit FE-UI. Jakarta.
- Badan Pusat Statistic. 2009. *Produk Domestik Regional Bruto*. Didownload dari http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=52¬ab=3 pada tanggal 20 Januari 2011
- Kadariah. 1985. *Ekonomi Perencanaan*. Lembaga Penerbit FE-UI. Jakarta.
- Kalensang, Golfinger; Tatu, J dan Rotinsulu. W. 2011. Kajian Keunggulan Komparatif dan Daya Saing Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Pasca Otonomi. Didownload dari <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/cocos/article/view/638/510> pada tanggal 23 September 2013
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Penerbit AMP YKPN Yogyakarta.
- Sutikno dan Maryunani. 2007. Analisis Potensi Dan Daya Saing Kecamatan Sebagai Pusat Pertumbuhan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Kabupaten Malang. *Journal of Indonesian Applied Economics*. Vol.1 No.1 Oktober 2007, 1-17
- Tambunan, Tulus. 2000. *Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran: Teori dan Temuan Empiris*. Pustaka LP3ES
- Waschaffer. 2010. *Regional Models Of Income Determination: Simple Economicbase Theory*. Didownload dari <http://www.rrl.wvu.edu/WebBook/Schaffer/Chapter%203%20S11%20for%20WVA2.pdf> pada tanggal 25 Januari 2011.